

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 506.597.809 atau mencapai 69,4 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 730.000.000 Sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 719.454.119 atau mencapai 102 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 706.985.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.275.243.954 atau mencapai 95,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.535.385.000 Sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.769.997.338 atau mencapai 97,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.939.123.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024. Nilai Aset Per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.873.053.681 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 364.588.206 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 5.508.465.475 Piutang Jangka Pendek (neto) Rp. 15.530.833 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 15.530.833 dan Rp. 5.857.522.848

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan / LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit / LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 505.730.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.916.062.426 sehingga terdapat surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai Rp.(5.410.332.426) kegiatan non operasional dan pos - pos luar biasa masing – masing sebesar Rp. (34.359.800) dan sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit – LO sebesar Rp. (5.444.692.226).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.12.045.542.383 dikurangi defisit – LO sebesar Rp. (5.444.692.226) kemudian ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. (743.328.428) sehingga ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 5.857.522.848.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



A
U
D
I
T
E
D

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TINGKAT SATKER T.A. 2024

**BALAI KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL
PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan Penegndalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu**

dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tarakan 05 Mei 2025

Plt.Kepala BKIPM Tarakan



Danmansyah, S.Pi.

NIP. 19780704 200801 1 014

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan Atas-Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Perubahan Laporan perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	54



**Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Tarakan**

Jl. Lestari RT 03 Karangharapan Kel.Tarakan Barat Kalimantan Utara

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarakan 05 Mei 2025

Plt.Kepala BKIPM Tarakan



Darmansyah, S.Pi.

NIP. 19780704 200801 1 014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 506.597.809 atau mencapai 69,4 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 730.000.000 Sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 719.454.119 atau mencapai 102 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 706.985.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.275.243.954 atau mencapai 95,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.535.385.000 Sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.769.997.338 atau mencapai 97,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.939.123.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024. Nilai Aset Per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.873.053.681 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 364.588.206 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 5.508.465.475 Piutang Jangka Pendek (neto) Rp. 15.530.833 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing- masing sebesar Rp. 15.530.833 dan Rp. 5.857.522.848

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan / LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit / LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 505.730.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.916.062.426 sehingga terdapat surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai Rp.(5.410.332.426) kegiatan non operasional dan pos - pos luar biasa masing – masing sebesar Rp. (34.359.800) dan sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit – LO sebesar Rp. (5.444.692.226).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.12.045.542.383 dikurangi defisit – LO sebesar Rp. (5.444.692.226) kemudian ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. (743.328.428) sehingga ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 5.857.522.848.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER TA 2024 DAN 31 DESEMBER TA 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER II TA. 2024		% thd Angg	REALISASI SEMESTER II TA. 2023
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	730.000.000	506.597.809	69,40	719.454.119
Jumlah Pendapatan		730.000.000	506.597.809	69,40	719.454.119
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.753.905.000	2.600.492.546	94,43	4.178.147.498
Belanja Barang	B.4	2.781.480.000	2.674.751.408	96,16	3.410.713.840
Belanja Modal	B.5	-	-	-	181.136.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		5.535.385.000	5.275.243.954	95,30	7.769.997.338

II. NERACA

BALAI KIPM TARAKAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
KasLainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang PNBP	C.4	0	223.809
Bagian Lancar TP / TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.7	0	(1.119)
Belanja dibayar di Muka	C.8	0	10.116.667
Persediaan	C.9	364.588.206	454.033.257
Jumlah Aset Lancar		364.588.206	464.372.614
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP / TGR	C.10	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.12	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.13	676.953.000	1.596.201.100
Peralatan dan Mesin	C.14	4.920.490.075	7.827.254.880
Gedung dan Bangunan	C.15	5.282.262.981	9.725.744.981
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16	323.460.000	1.114.727.520
Aset Tetap Lainnya	C.17	0	106.480.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(5.649.700.581)	(8.763.589.529)
Jumlah Aset Tetap		5.508.465.475	11.606.818.952
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	0	0
Aset Lain-lain	C.21	0	0

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.22	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		5.873.053.681	12.071.191.566
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	15.530.833	25.649.183
Pendapatan yang ditangguhkan Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar	C. 25	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.530.833	25.649.183
JUMLAH KEWAJIBAN		15.530.833	25.649.183
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	5.857.522.848	12.045.542.383
JUMLAH EKUITAS		5.857.522.848	12.045.542.383
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.873.053.681	12.071.191.566

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM TARAKAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31-Des-24	31-Des-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	505.730.000	710.005.000
JUMLAH PENDAPATAN		505.730.000	710.005.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.600.492.546	4.177.923.689
Beban Persediaan	D.3	185.587.203	341.021.332
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.556.574.712	1.755.346.371
Beban Pemeliharaan	D.5	481.741.915	508.685.111
Beban Perjalanan Dinas	D.6	560.066.446	859.549.642
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	531.599.604	788.504.464
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	1.119
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		5.916.062.426	8.431.031.728
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.410.332.426)	(7.721.026.728)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	644.000	7.000.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14	35.003.800	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(34.359.800)	7.000.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	-	2.160.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	-	2.160.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(34.359.800)	9.160.000
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.18	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.19	-	-
Beban Persediaan	D.20	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.444.692.226)	(7.711.866.728)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM TARAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31-Des-24	31-Des-23
EKUITAS AWAL	E.1	12.045.542.383	12.685.161.446
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.444.692.226)	(7.711.866.728)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
	E.5	1.119	1.446
Penyesuaian Nilai Aset	E.7	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.8	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.9	-	-
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.10	-	-
Lain-Lain	E.11	1.119	1.446
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.12	743.328.428	7.072.246.219
Ditagihkan ke entitas lain	E.13	(5.275.243.954)	(7.769.997.338)
Diterima dari entitas lain	E.14	506.597.809	719.454.119
Transfer keluar	E.15	-	-
Transfer masuk	E.16	-	-
Pengesahan hibah langsung	E.17	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.18	(6.188.019.535)	(639.619.063)
EKUITAS AKHIR		5.857.522.848	12.045.542.383

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Kantor
BKIPM
Tarakan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Lestari No.03- Tarakan, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakandiharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan berkomitmen dengan :

VISI:

" Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya."

MISI :

"Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya".

TUJUAN :

"Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan".

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakanyang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Tarakan;

8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan;
9. Terkelolanya anggaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan secara optimal.

Pendekatan
penyusunan
laporan
keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (**SAKTI**) yaitu serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sakti merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan sebagai pengganti aplikasi SAI atau Sistem Akuntansi Instansi yang terintegrasi Berbasis web. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai KIPM Tarakan menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Balai KIPM Tarakan dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi.

Yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Balai KIPM Tarakan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan Negara bukan pajak.

Kebijakan – kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BKIPM Tarakan adalah sebagai

berikut :

Pendapatan
LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan di akui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung di akui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda di akui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akutansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban di sajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada

pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

*Piutang Tidak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada peraturan Menteri keuangan no. 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
akuntansi
berbasis akrual
pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Balai KIPM Tarakan* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	730,000,000	730,000,000
Pendapatan lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	730,000,000	730,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,571,997,000	2,753,905,000
Belanja Barang	2,733,330,000	2,781,480,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	5,305,327,000	5,535,385,000

Realisasi
Pendapatan
Negara Rp.
506.597.809

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 506.597.809 atau mencapai 69,4 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 730.000.000 Keseluruhan Pendapatan Kantor Balai KIPM Tarakan terdiri dari Pendapatan pejualan peralatan dan Mesin, Pendapatan Pengujian ,Sertifikasi,Kalibrasi dan standarisasi lainnya,Pendapatan jasa Karantina Perikanan dan Pendapatan lain-lain dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	644.000	-
2. Pendapatan Jasa	730.000.000	505.730.000	69,28
3. Pendapatan lain-lain		-	-
Jumlah	730.000.000	506.374.000	69,28

Realisasi Pendapatan Jasa (akun penerimaan 425289 dan 425332) per 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sebesar 29,62 % dibandingkan per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan pada akun 425289 dan 425332, serta terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal lain yang menjadi penyebab turunnya realisasi pendapatan adalah berpindahnya fungsi perkarantinaan ke Badan Karantina Indonesia dalam hal ini di BKHIT Provinsi Kalimantan Utara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	644.000	7.000.000	-90,80
2. Pendapatan Jasa	505.730.000	710.005.000	-28,77
3. Pendapatan Lain-Lain	-	2.449.119	-
Jumlah Pendapatan	506.374.000	719.454.119	-29,62

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
5.275.243.954

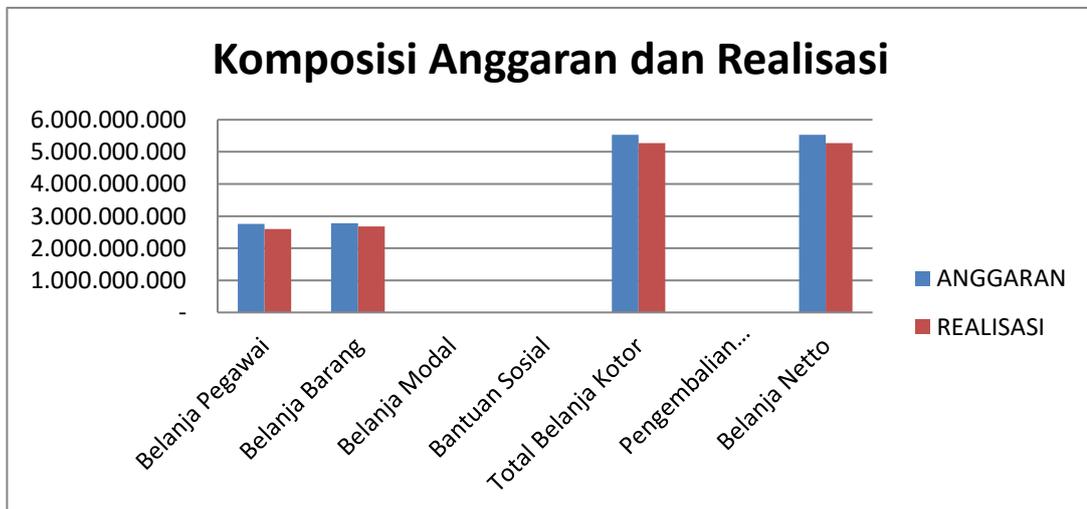
Realisasi Belanja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.5.275.243.954 atau sebesar 95,3 % dari anggarannya sebelum dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan pada TA 2024

adalah sebesar Rp. 5.535.385.000 Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,753,905,000	2,600,492,546	94.43
Belanja Barang	2,781,480,000	2,674,751,408	96.16
Belanja Modal	-	-	0
Bantuan Sosial	-	-	0
Total Belanja Kotor	5,535,385,000	5,275,243,954	95.30
Pengembalian Belanja			0
Belanja Netto	5,535,385,000	5,275,243,954	95.30

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 32.11 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, dikarenakan naiknya belanja barang dan realisasi belanja modal pada tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2024	REALISASI PER 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.600.492.546	4.178.147.498	(37,76)
Belanja Barang	2.674.751.408	3.410.713.840	(21,58)
Belanja Modal	-	181.136.000	(100,00)
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	5.275.243.954	7.769.997.338	(32,11)

Belanja
Pegawai Rp
2.600.492.546

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.600.492.546 dan Rp. 4.178.149.498. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 37,76 % dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya Perpindahan pegawai Jabatan Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan ke BKHIT Kalimantan Utara, naik pangkat sebanyak 3 orang, naik jabatan/alih jenjang 1 orang dari inspektur mutu ahli pertama ke ahli muda, perpindahan jabatan 1 orang dari pelaksana ke APK APBN ahli pertama, dan adanya kenaikan gaji berkala sebanyak 8 orang.

Pada bulan September 2024 dan Oktober 2024 terdapat pengembalian belanja tunjangan struktural senilai Rp. 1.080.000 dikarenakan adanya perpindahan jabatan 1 orang pegawai dari jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional tertentu APK APBN Ahli Muda.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.441.971.081	4.115.026.556	(40,66)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	109.733.799	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	49.868.000	63.123.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.601.572.880	4.178.149.556	(37,73)
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.080.334)	(58)	
Jumlah Belanja Bersih	2.600.492.546	4.178.149.498	(37,76)

Belanja
Barang Rp
2.647.751.408

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.674.751.408 dan Rp. 3.410.713.840 Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 21.58 % dari Realisasi Belanja Barang per per 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan karena naiknya belanja barang non operasional dan belanja jasa, serta menurunnya belanja barang operasional, belanja pemeliharaan, belanja barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam negeri pada tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional (5211)	750.493.061	1.129.274.727	(33,54)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	115.169.960	100.923.700	14,12
Belanja Jasa (5221)	690.913.374	526.057.785	31,34
Belanja Pemeliharaan (5231)	458.329.715	476.185.945	(3,75)
Belanja Barang Konsumsi (5218)	99.778.852	318.722.041	(68,69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	565.959.574	859.549.642	(34,16)
Jumlah Belanja Kotor	2.680.644.536	3.410.713.840	(21,41)
Pengembalian Belanja	5.893.128	-	
Jumlah Belanja Bersih	2.674.751.408	3.410.713.840	(21,58)

B.5 Belanja Modal

Belanja
Modal Rp.
0

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 181.136.000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain: karena adanya realisasi belanja modal pada tahun 2023 dan tidak adanya belanja modal pada Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	181,136,000	-100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	181,136,000	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	181,136,000	-100.00

Belanja
Modal Tanah
Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada belanja Modal tanah pada periode ini

Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja
Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp. 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 181.136.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 100 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Alat Pengolahan			
Alat Kantor			
Alat Rumah Tangga	0	181,136,000	(100.00)
Alat Studio			
Peralatan Pemancar			
Unit Alat Laboratorium			
Alat Kedokteran			
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi			
Alat Komunikasi			
Komputer Unit			
Peralatan Komputer			
Unit Peralatan Proses/Produksi			
Jumlah Belanja Kotor	0	181,136,000	(100.00)
Mutasi			
Jumlah Belanja Bersih	0	181,136,000	(100.00)

Belanja
Modal
Gedung
dan
bangunan
Rp. 0

B.5.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode 31 Desember 2024 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	-	-

Belanja
Modal
jalan, irigasi
dan
jaringan
Rp.0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada periode ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Jalan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	-	-

Belanja
Modal
lainnya
Rp.0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal lainnya pada periode ini.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Realisasi belanja bantuan sosial pada periode ini.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak **C.4 Piutang PNB**

Rp. 0

Saldo Piutang PNB 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR
Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp .0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1			-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.1.119 .

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Bagian Lancar TP/TGR		0.00%	
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Bagian Lancar TPA		0.00%	
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja
Dibayar
dimuka
Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.10.116.667 Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	6.879.167
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	3.237.500
Jumlah	-	10.116.667

Pendapatan yang masih harus diterima Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp. 364.588.206

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 364.588.206 dan Rp.454.033.257

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Persediaan	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Barang Konsumsi	64.500.415	82.066.890
Barang untuk Pemeliharaan	464.800	2.867.900
Suku Cadang	17.320.000	28.770.200
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	282.302.991	340.328.267
Jumlah	364.588.206	454.033.257

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

TPA
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1			
2			
3			
4			
5		-	
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-	0.00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Tanah
Rp.
676.953.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Tarakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 676.953.000 dan Rp. 1.596.201.100 . Terdapat Penurunan nilai aset tetap Tanah di Tahun 2024 dikarenakan adanya peralihan aset tanah di wilker nunukan dan sebatik ke BKHIT Kaltara dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.596.201.100
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	919.248.100
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	676.953.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	Alamat
1	2	1.010 M ²	676.953.000	Jl.Lestari Tarakan
Total		Rp	676.953.000	

Peralatan dan
Mesin
Rp.4.920.490.075

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.4.920.490.075 dan Rp.7.827.254.880. Terdapat mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin Pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.827.254.880
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(2.906.764.805)
Saldo per 31 Desember 2024	4.920.490.075
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4.637.437.441)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	283.052.634

Gedung dan
Bangunan
Rp
5.282.262.981

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 5.282.262.981 dan Rp. 9.725.744.981 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.725.744.981
Mutasi tambah:	
Bangunan Gedung kantor	-
Bangunan Gedung Instalasi	-
Mutasi kurang:	
Pelepasan Aset Gedung dan Bangunan	(4.443.482.000)
Saldo per 31 Desember 2024	5.282.262.981
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(896.415.870)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.385.847.111

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.323.460.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.323.460.000 dan Rp.1.114.727.981 terdapat mutasi kurang atas Jalan, irigasi dan Jaringan Pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. 791.267.981. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.114.727.981
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan tambah daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Pelepasan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(791.267.981)
Saldo per 31 Desember 2024	323.460.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(160.847.270)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	162.612.730

Aset Tetap
Lainnya
Rp.0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 0 dan Rp.106.480.000. Aset tetap lainnya tersebut berupa Monografi dan Naskah/Manuskrip berbahan lainnya. Terdapat mutasi kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2024 dikarenakan dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut.

Konstruksi

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Dalam
Pengerjaan
Rp. 0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada TA anggaran 2024.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(5.694.700.581)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(5.694.700.581) dan Rp(8.763.589.529). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.920.490.075	4.637.437.441	283.052.634
2	Gedung dan Bangunan	5.282.262.981	896.415.870	4.385.847.111
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.460.000	160.847.270	162.612.730
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		10.526.213.056	5.694.700.581	4.831.512.475

Aset Tak
Berwujud Rp.0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Balai KIPM Tarakan tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah: Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp. 0.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Uang Muka
dari KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.15.530.833

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.15.530.833 dan Rp.25.649.183 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Tarakan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2024

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Air	303.550	Bulan Desember 2024
Beban Langganan Internet	1.032.300	Bulan Desember 2024
Beban Langganan Telepon	53.391	Bulan Desember 2024
Beban Langganan Listrik	14.141.592	Bulan Desember 2024
Total	15.530.833	

Pendapatan
yang
ditangguhkan
Rp 0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan

pajak yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Balai KIPM Tarakan per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNBPN	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang
masih harus
dibayar
Rp.15.530.833

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.530.833 dan Rp.25.649.183 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.530.833	25.649.183
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	15.530.833	25.649.183

Ekuitas
Rp.
6.027.810.818

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.027.810.818 dan Rp. 12.045.542.383. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp.
505.730.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.505.730.000 dan Rp. 710.005.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	per 31 DESEMBER 2024	per 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	505.730.000	710.005.000	-28,77
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	505.730.000	710.005.000	-28,77

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Akun 425332 Pendapatan/Jasa Karantina Ikan dan Akun 425289 Jasa Pemeriksaan Mutu Karantina Ikan per 31 Desember 2024, sedangkan pendapatan lain lain yaitu berupa pendapatan penjualan peralatan dan mesin.

Beban
Pegawai Rp.
2.600.492.546

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

adalah masing-masing sebesar Rp.2.600.492.546 dan Rp. 4.178.147.556. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.303.382.677	2.112.667.765	(38,31)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.247.241.869	2.002.356.791	(37,71)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	
Beban Lembur	49.868.000	63.123.000	(21,00)
Jumlah	2.600.492.546	4.178.147.556	(97,02)

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp.185.587.203

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 185.587.203 dan Rp. 341.021.332. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	126.272.927	159.485.202	-20,82
Beban Bahan Baku	59.314.276	181.536.130	-67,33
Beban Suku Cadang		-	#DIV/0!
Beban untuk Pemeliharaan		-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	185.587.203	341.021.332	#DIV/0!

Beban Barang
dan Jasa Rp.
1.541.043.879

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.541.043.879 dan Rp. 1.755.346.371. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	485.061.397	809.481.108	(40,08)
beban penambah Daya tahan tubuh	89.280.200	91.189.900	(2,09)
Beban Pengiriman surat dinas pos surat	8.792.997	11.185.500	(21,39)
beban Honor operasional satker	86.380.000	173.530.000	(50,22)
beban barang operasional lainnya	76.322.886	48.543.800	57,22
beban barang operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban bahan	112.221.960	92.693.700	21,07
Beban Honor Output Kegiatan	2.948.000	8.230.000	-
Beban barang Non Operasional lainnya			-
beban barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa	170.312.500	282.264.998	(39,66)
Beban Sewa	36.368.167	128.457.623	(71,69)
Beban Jasa Profesi	1.800.000	2.700.000	(33,33)
Beban Jasa lainnya	471.555.772	107.069.742	340,42
Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan me	0	0	-
Jumlah	1.541.043.879	1.755.346.371	(12,21)

Beban
Pemeliharaan
Rp 481.741.915

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 481.741.915 dan Rp. 508.685.111. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256.744.740	299.300.000	(14,22)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.584.975	176.885.945	13,96
Beban persediaan untuk pemeliharaan	11.962.000	16.295.900	(26,60)
Beban persediaan suku cadang	11.450.200	16.203.266	(29,33)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			-
Jumlah	481.741.915	508.685.111	(56,18)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.560.066.446.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.560.066.446 dan Rp. 859.549.642. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	425.028.534	269.076.160	57,96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.370.000	240.080.000	(60,28)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.667.912	350.393.482	(88,68)
Jumlah	560.066.446	859.549.642	(91,00)

Beban Barang

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp 0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.531.599.604.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.531.599.604 dan Rp. 788.504.464 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	327.844.211	507.956.872	(35,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	158.614.289	210.411.821	(24,62)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	45.141.104	70.135.771	(35,64)
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak di gunakan dalam Operasional pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	531.599.604	788.504.464	(32,58)
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	531.599.604	788.504.464	(32,58)

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp. 0.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 1.119. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	1.119	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	-	1.119	-

Beban Lain-lain
Rp 0.

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain

merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp.(34.359.800)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (34.359.800) dan Rp. 9.160.000. terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Depisit pelepasan aset non lancar			
Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	-	-
pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	644.000	7.000.000	(90,80)
pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	2.160.000	(100,00)
Beban pelepasan Aset Non Lancar	35.003.800	-	100,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(34.359.800)	9.160.000	(475,11)

Pos Luar Biasa
Rp.0.

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.12.045.542
.383

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12.045.542.383 dan Rp.12.685.161.446.

Defisit LO
Rp.(5.444.692
.226)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(5.444.692.226) dan Rp.(7.711.866.728). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

Koreksi Aset
Tetap Rp 0.

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas
Beban Rp 0.

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp 0.

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir
Rp.5.857.522
.848

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.857.522.848 dan Rp. 12.045.542.383.

F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ⦿ Selama periode tahun anggaran 2024, Balai KIPM Tarakan terdapat pergantian struktur organisasi, M. Roy Pahlavi, A.Md., Pi. Diangkat sebagai Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan menggantikan Umar,S.Pi,M.Si,MM dan menjabat sebagai kepala kantor dan selaku KPA dari bulan Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.
- ⦿ Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan per 31 Desember 2024 memiliki transaksi respirokal yakni pembayaran perpanjangan sertifikasi SNI ISO 17020 senilai Rp. 7.000.000
- ⦿ Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan per 31 Desember 2024 mempunyai utang kepada pihak ketiga yaitu belanja barang yang masih harus dibayar berupa pembayaran Langganan Air,Listrik, Telepon dan Internet bulan desember 2024 senilai Rp.15.530.833.
- ⦿ Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan melakukan pengalihan aset ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara yang berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp. 6.042.768.100, dan selain tanah dan/atau bangunan senilai Rp. 2.865.933.025
- ⦿ Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan melakukan pemindahbukuan pendapatan PNBP ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara senilai Rp. 48.880.000
- ⦿ Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN (Terlampir)
- ⦿ Pengungkapan Program Prioritas Nasional (Terlampir)

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

- ✚ Print Out LK dari MONSAKTI per 31 Desember 2024
- ✚ SK Tim Pengelola Laporan Keuangan TA. 2024
- ✚ DIPA Awal dan Revisi terakhir per 31 Desember 2024
- ✚ LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Bulan
Desember 2024
- ✚ Rekening Koran Bank per 31 Desember 2024
- ✚ Bukti Setoran Sisa UP TA. 2024
- ✚ Memo Penyesuaian Semester II TA. 2024
- ✚ Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Satker
- ✚ CHR Laporan Keuangan Semester II TA. 2024 oleh
Inspektorat Jenderal KKP
- ✚ Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN
Tahun 2024
- ✚ Pengungkapan Program Prioritas Nasional Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

JALAN LESTARI RT. 03 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111

TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803

LAMAN www.kkp.go.id POS ELEKTRONIK ski_juata@yahoo.com / skipmtarakan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
NOMOR : B. 2/KPA/BKIPM.TRK/KU.110/I/2024**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA ANGGARAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kuasa Pengguna Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan :

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Petikan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja serta besaran honorarium tenaga pengelola anggaran;
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk memangku jabatan sebagai pengelola anggaran pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Nomor SP DIPA-032.13.2.649572/2024 tanggal 28 Nopember 2023;
 2. Rencana Operasional Kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024;
 3. Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Pertama : Struktur organisasi pengelola anggaran pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini;
- Kedua : Uraian tugas dan tata kerja organisasi pengelola anggaran pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 (dua) keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai tenaga pengelola anggaran diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran Petikan DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum pada lajur 5 lampiran 3 (tiga) keputusan ini;
Dalam hal ketentuan besaran honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut :
- a. Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
 1. Pejabat/ Pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/ atau pengadaan barang/ jasa;
 2. Pejabat Fungsional di bidang perbendaharaan; atau
 3. Pejabat Fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa.
 - b. Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
 1. Pejabat/ Pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/ atau pengadaan barang/ jasa;
 2. Pejabat Fungsional lainnya.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Kuasa Pengguna Anggaran
Balai KIPM Tarakan,

[Handwritten Signature]
M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP
NIP. 19790605 200312 1 004

Lampiran 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan
Nomor : B. 2/KPA/BKIPM.TRK/KU.110/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kuasa Pengguna Anggaran
Balai KIPM Tarakan,

M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP
NIP. 19790605 200312 1 004

Lampiran 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Tarakan
Nomor : B. 2/KPA/BKIPM.TRK/KU.110/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PENGELOLA ANGGARAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal ini adalah DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024;
2. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya, diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang secara formal maupun material bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja dan atau Pimpinan Unit Eselon I terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
3. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat dan diberi kewenangan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara;
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang diangkat dan diberi kewenangan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
5. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pegawai yang diangkat oleh KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai;
7. Staf Kuasa Pengguna Anggaran adalah pegawai yang diangkat oleh KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu KPA dalam urusan kegiatan dalam bidang tertentu.
8. Staf Pejabat Pembuat Komitmen adalah pegawai yang diangkat oleh KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu PPK dalam urusan kegiatan dalam bidang tertentu.

9. Staf Pejabat Penandatanganan SPM adalah pegawai yang diangkat oleh KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu PPSPM dalam urusan kegiatan dalam bidang tertentu.

Pasal 2 UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Unsur-unsur organisasi pengelola anggaran terdiri dari :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
6. Staf Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Staf Pejabat Pembuat Komitmen;
8. Staf Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNSUR-UNSUR ORGANISASI

1. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pemegang Uang Muka Kerja;
 - b. Menetapkan Rencana Operasional Kegiatan Satuan Kerja;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan anggaran;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai akun yang bersangkutan;
 - e. Melakukan pemeriksaan tugas dan tanggung jawab terhadap PPK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - f. Melakukan pemeriksaan tugas dan tanggung jawab terhadap Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - g. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya;
 - i. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - j. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Secara formal dan material bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran melalui Pimpinan Unit Eselon I terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
2. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara perencanaan dan alokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
 - g. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA/Kepala Satuan Kerja;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja;
 - k. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 - l. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
 - m. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perjalanan Dinas (SPD) berdasarkan SPT atas persetujuan KPA;
 - n. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 - o. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah,-);
 - p. Menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak;
 - q. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
 - r. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
 - s. Mengajukan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;
 - t. Membuat/menerbitkan Surat Permintaan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - u. Menyusun dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - v. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual;
 - w. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya;
 - x. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
3. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kegiatan penerimaan, persiapan, dan mengeluarkan atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran setelah :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - c. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan atas penerimaan negara yang berasal dari pajak-pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pembukuan;
 - f. Membuat Laporan Keadaan Kas (LKK) dan Daftar Keadaan Kredit Anggaran dan Kas tiap akhir bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan;
 - g. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tiap bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan UAPPA-W;
 - h. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Umum Negara.
4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menerima berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh PPK;
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
 - c. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - e. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja
 - f. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna menyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kedaluwarsa);
 - g. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - h. Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan :
 - Lembar pertama disampaikan kepada KPPN pembayar;

- Lembar kedua sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
 - i. Melakukan injeksi Pin PPSPM pada adk SPM yang diajukan ke KPPN.
 - j. Menyampaikan SPM kepada KPPN dengan melampirkan berkas kelengkapan pengajuan SPM;
 - k. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaiakannya kepada Kepala Satuan Kerja;
 - l. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembayaran.
5. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) mempunyai tugas: Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola dan menatausahakan pelaksanaan belanja pegawai.
 6. Staf Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas: Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan locking pagu pada proses revsi anggaran.
 7. Staf Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas: Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam manajemen supplier, manajemen kontrak dan pencatatan BAST.
 8. Staf Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas: Membantu Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dalam pelaksanaan pencairan dana APBN.



Kuasa Pengguna Anggaran Ke-
Balai KIPM Tarakan,

M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP
NIP. 19790605 200312 1 004

Lampiran 3 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan
 Nomor : B. 2/KPA/BKIPM.TRK/KU.110/II/2024
 Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL DAN BESARNYA HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN
 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	HONOR PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP NIP. 19790605 200312 1 004	Penata Tk.1 (III / d)	Kuasa Pengguna Anggaran	2.590.000
2	Ari Wahyudi K., S.St.Pi NIP. 19840103 201101 1 001	Penata (III / c)	Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000
3	Kurnia Catur Pratiwi, S.E NIP. 19840228 201012 2 001	Penata Tk.1 (III / d)	Pejabat Penanda Tangan SPM	950.000
4	Nurhayati, S.Mn NIP. 19821220 201410 2 001	Penata Muda (III / a)	Bendahara Pengeluaran	850.000
5	Darmansyah, S.Pi NIP. 19780704 200801 1 014	Penata Tk.1 (III / d)	Staff Pengelola Anggaran	640.000
6	Whidi Anggraeni, S.Pi NIP. 19790301 200701 2 011	Penata Muda Tk I (III / b)	Staff Pengelola Anggaran	640.000
7	D. Lia Lidayana, S.St.Pi NIP. 19820624 200801 2 012	Penata Tk. I (III / d)	Staff Pengelola Anggaran	640.000
8	Ebid Syamsu Rizal, S.Pi NIP. 19800901 200803 1 002	Penata Tk.1 (III / d)	Staff Pengelola Anggaran	640.000
9	Eko Prasetya Budi, S.Mn NIP. 19821206 200212 1 001	Penata (III / c)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	570.000



Kuasa Pengguna Anggaran
 Balai KIPM Tarakan,

M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP
 NIP. 19790605 200312 1 004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.649572/2024**



DS:3687-7667-9067-9948

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
4. Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
- Sebesar : Rp. 7.605.671.000 (TUJUH MILIAR ENAM RATUS LIMA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	7.102.396.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	503.275.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN T A R A K A N (048) Rp. 7.605.671.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024



DS:3687-7667-9067-9948

Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	330.850.000
EC.3989	Pengendalian Mutu	Rp.	330.850.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	679.381.000
HB.3988	Karantina Ikan	Rp.	438.881.000
HB.3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Rp.	240.500.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.595.440.000
WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp.	6.595.440.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



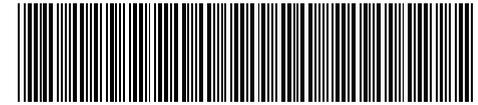
DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 1

Program	: 032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			330.850.000
Kegiatan	: 3989	Pengendalian Mutu			330.850.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			
	: 2. 02	Dokumen Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor			
	: 3. 03	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan			
	: 4. 04	Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI			
	: 5. 05	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability			
	: 6. 06	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI			
	: 7. 07	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor			
	: 8. 08	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			
	: 9. 09	Keberterimaan Produk di negara tujuan ekspor			
	: 10. 10	Jumlah Sertifikat CPIB pada suplier hasil perikanan			
	: 11. 11	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 3989.ADF	Sertifikasi Lembaga	5,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	48.300.000
Rincian Output	: 01	ADF.001 Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	5,00	Lembaga	48.300.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan	14.550.000
Rincian Output	: 01	BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1,00	Produk	14.550.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	3989.PDC	Sertifikasi Produk		30,00	produk, Sertifikat	55.000.000
Rincian Output		:	01	PDC.001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (PN)	30,00	produk	55.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		4,00	Produk, Laporan, Keputusan	87.000.000
Rincian Output		:	01	QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (PN)	4,00	Produk	87.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		25,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	126.000.000
Rincian Output		:	01	QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (PN)	10,00	Lembaga	12.000.000
Rincian Output		:	02	QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PN)	15,00	Lembaga	114.000.000
Program		:	032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				679.381.000
Kegiatan		:	3988	Karantina Ikan				438.881.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan				
		:	2. 02	Pemetaan Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi				
		:	3. 03	Persentase pencegahan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi				
		:	4. 04	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity				
		:	5. 05	Efektifitas pencegahan HPIK dan Pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan impor media pembawa HPIK				
		:	6. 06	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)				
		:	7. 07	Persentase Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan				
		:	8. 08	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin kesehatannya dinegara tujuan ekspor				
		:	9. 09	Dokumen Mitigasi risiko lalulintas media pembawa HPIK				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 3

Karantina Ikan

- 10. 10 Pemantauan Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi
- 11. 11 Jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
- 12. 12 Sarana dan Prasarana pengawasan karantina

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3988.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	80.444.000
Rincian Output		:	01 ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	56.603.000
		:	02 ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif	2,00	Rekomendasi Kebijakan	18.841.000
		:	03 ABR.004	Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko media pembawa HPIK	1,00	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3988.PDC	Sertifikasi Produk	90,00	produk, Sertifikat	287.233.000
Rincian Output		:	01 PDC.001	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik (PN)	90,00	produk	287.233.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3988.PDF	Sertifikasi Lembaga	9,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	52.556.000
Rincian Output		:	01 PDF.001	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity (PN)	9,00	Lembaga	52.556.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3988.QCE	Penanganan Perkara	1,00	Perkara, Berkas Perkara	18.648.000
Rincian Output		:	01 QCE.001	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan (PN)	1,00	Perkara	18.648.000
Kegiatan		:	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			240.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah metode dan/atau parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI dan standar metode, uji profisiensi, validasi metode, kit diagnostik dan kontrol positif)			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- 01 Jumlah metode dan/atau parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI dan standar metode, uji profisiensi, validasi metode, kit diagnostik dan kontrol positif)
- 2. 02 Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM
- 3. 03 Unit kerja yang dievaluasi dalam penerapan standar metode pengujian
- 4. 04 Unit kerja yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengujian parameter destructive fishing
- 5. 05 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
- 6. 06 Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten
- 7. 07 Jumlah Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi
- 8. 08 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi
- 9. 09 Inovasi pelayanan publik BKIPM yang lolos seleksi administrasi Kompetisi Inovasi Layanan Publik
- 10. 10 Persentase unit kerja/UPT yang memperoleh Nilai Kepuasan Masyarakat secara elektronik > 85
- 11. 11 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pengelolaan anggota jejaring laboratorium pengujian pangan indonesia sektor kelautan dan perikanan
- 12. 12 Jumlah kebijakan teknis standardisasi sistem dan kepatuhan, perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu

Klasifikasi Rincian Output	5	:	3990.ADD	Standardisasi Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja	12.500.000	
Rincian Output		:	01	ADD.001	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	1,00	Lembaga	12.500.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3990.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	75.000.000	
Rincian Output		:	01	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	75.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



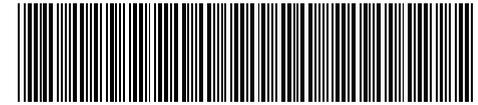
DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	7	:	3990.PDD	Standarisasi Lembaga		3,00	Lembaga, Unit Kerja	45.000.000	
Rincian Output		:	01	PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	(PN)	1,00	Lembaga	25.000.000
		:	02	PDD.004	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	(PN)	2,00	Lembaga	20.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	3990.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		3,00	Produk, Laporan, Keputusan	108.000.000	
Rincian Output		:	01	QIA.001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	(PN)	3,00	Produk	108.000.000
Program		:	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				6.595.440.000	
Kegiatan		:	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				6.595.440.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai PM PRB BKIPM					
		:	2. 02	Indeks Profesionalitas ASN					
		:	3. 03	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi					
		:	4. 04	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran					
		:	5. 05	Nilai PM SAKIP					
		:	6. 06	Nilai Maturitas SPIP					
		:	7. 07	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar					
		:	8. 08	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja					
		:	9. 09	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik					
		:	10. 10	Nilai IKPA					
		:	11. 11	Nilai NKA					
		:	12. 12	Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.445.380.000
Rincian Output	:		01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	21.500.000
			02	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	23.808.000
			03	EBA.962 Layanan Umum	2,00	Layanan	10.800.000
			04	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	16.543.000
			05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	6.372.729.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	35,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	39.750.000
Rincian Output	:		01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	35,00	Orang	39.750.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	110.310.000
Rincian Output	:		01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	29.640.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	44.020.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	33.375.000
			04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	3.275.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

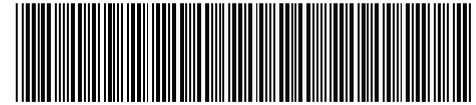
ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3687-7667-9067-9948

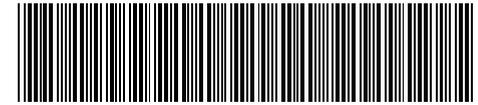
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	7.605.671.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	7.102.396.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	503.275.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	4.145.059	3.460.612	-	-	-	7.605.671		
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	330.850	-	-	-	330.850		
3989	Pengendalian Mutu	-	330.850	-	-	-	330.850		
3989.ADF	Sertifikasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	48.300	-	-	-	48.300	35 . 51	
01	RM	-	32.205	-	-	-	32.205	048	
04	PNBP	-	16.095	-	-	-	16.095	048	
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	14.550	-	-	-	14.550	35 . 51	
01	RM	-	14.550	-	-	-	14.550	048	
3989.PDC	Sertifikasi Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	55.000	-	-	-	55.000	35 . 51	
01	RM	-	8.600	-	-	-	8.600	048	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAkan
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	46.400	-	-	-	46.400	048	
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	-	87.000	-	-	-	87.000	35 . 51	
01 RM		-	87.000	-	-	-	87.000	048	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	-	126.000	-	-	-	126.000	35 . 51	
01 RM		-	35.100	-	-	-	35.100	048	
04 PNBP		-	90.900	-	-	-	90.900	048	
032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	679.381	-	-	-	679.381		
3988	Karantina Ikan	-	438.881	-	-	-	438.881		
3988.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	-	80.444	-	-	-	80.444	35 . 51	
01 RM		-	75.844	-	-	-	75.844	048	
04 PNBP		-	4.600	-	-	-	4.600	048	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3988.PDC	Sertifikasi Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	287.233	-	-	-	287.233	35 . 51	
01	RM	-	50.810	-	-	-	50.810	048	
04	PNBP	-	236.423	-	-	-	236.423	048	
3988.PDF	Sertifikasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	52.556	-	-	-	52.556	35 . 51	
01	RM	-	25.556	-	-	-	25.556	048	
04	PNBP	-	27.000	-	-	-	27.000	048	
3988.QCE	Penanganan Perkara (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	18.648	-	-	-	18.648	35 . 51	
01	RM	-	18.648	-	-	-	18.648	048	
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	-	240.500	-	-	-	240.500		
3990.ADD	Standarisasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	12.500	-	-	-	12.500	35 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	12.500	-	-	-	12.500	048@	
3990.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	75.000	-	-	-	75.000	35 . 51	
01 RM		-	60.000	-	-	-	60.000	048@	
04 PNBP		-	15.000	-	-	-	15.000	048@	
3990.PDD	Standarisasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	45.000	-	-	-	45.000	35 . 51	
01 RM		-	30.600	-	-	-	30.600	048@	
04 PNBP		-	14.400	-	-	-	14.400	048@	
3990.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	108.000	-	-	-	108.000	35 . 51	
01 RM		-	108.000	-	-	-	108.000	048@	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	4.145.059	2.450.381	-	-	-	6.595.440		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.145.059	2.450.381	-	-	-	6.595.440		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
Kewenangan : (KD)

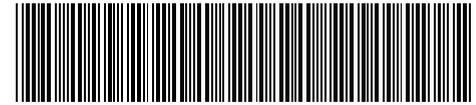
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	4.145.059	2.300.321	-	-	-	6.445.380	35 . 51	
01	RM	4.145.059	2.276.513	-	-	-	6.421.572	048	
04	PNBP	-	23.808	-	-	-	23.808	048	
3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	39.750	-	-	-	39.750	35 . 51	
01	RM	-	31.250	-	-	-	31.250	048	
04	PNBP	-	8.500	-	-	-	8.500	048	
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	110.310	-	-	-	110.310	35 . 51	
01	RM	-	90.161	-	-	-	90.161	048	
04	PNBP	-	20.149	-	-	-	20.149	048	
JUMLAH		4.145.059	3.460.612	-	-	-	7.605.671		

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



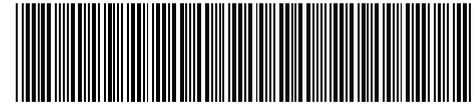
DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	516.237	571.111	630.612	953.660	835.930	651.964	601.792	585.852	615.672	614.806	541.990	486.047	7.605.671
		BELANJA PEGAWAI	287.381	311.881	314.943	629.188	528.818	321.391	291.821	292.586	291.558	291.043	292.741	291.706	4.145.059
		BELANJA BARANG	228.856	259.230	315.669	324.472	307.111	330.574	309.971	293.266	324.114	323.762	249.249	194.340	3.460.612
032.13.EC.3989		Pengendalian Mutu	942	11.088	27.359	31.763	23.395	28.500	58.420	29.190	35.220	52.519	21.950	10.506	330.850
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	942	11.088	27.359	31.763	23.395	28.500	58.420	29.190	35.220	52.519	21.950	10.506	330.850
032.13.HB.3988		Karantina Ikan	1.385	4.000	43.344	11.455	30.669	5.100	57.994	52.787	74.840	69.140	46.617	41.549	438.881
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.385	4.000	43.344	11.455	30.669	5.100	57.994	52.787	74.840	69.140	46.617	41.549	438.881
032.13.HB.3990		Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	0	5.163	21.400	23.135	9.149	86.794	29.317	20.207	39.543	3.997	1.506	289	240.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	5.163	21.400	23.135	9.149	86.794	29.317	20.207	39.543	3.997	1.506	289	240.500
032.13.WA.3987		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	513.910	550.860	538.510	887.307	772.717	531.571	456.061	483.667	466.069	489.149	471.917	433.703	6.595.440
		51 BELANJA PEGAWAI	287.381	311.881	314.943	629.188	528.818	321.391	291.821	292.586	291.558	291.043	292.741	291.706	4.145.059
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	226.529	238.979	223.567	258.119	243.898	210.180	164.239	191.081	174.511	198.106	179.175	141.997	2.450.381
		PERKIRAAN PENERIMAAN	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	730.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425289)	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	690.000
		- PNBP (425332)	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000	

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : [35] KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Satker : [649572] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.620
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 240.500		Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	52 Belanja Barang Rp. 240.500		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3990.PDD	Standarisasi Lembaga
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan		521211 Belanja Bahan(RM)
3990.ADD	Standarisasi Lembaga		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.900
	521211 Belanja Bahan(RM)		Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.450		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.893
	522141 Belanja Sewa(RM)		Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.050		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.607
3990.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.500		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.880		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.200
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	3990.QIA	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000		Pengawasan dan Pengendalian Produk
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		521211 Belanja Bahan(RM)
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.150
			Alokasi tidak sesuai dengan Surat Usulan Men KP
			Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : [35] KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Satker : [649572] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP	Rp. 87.730		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Alokasi tldak sesuai dengan Surat Usulan Men KP	Rp. 5.120		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3687-7667-9067-9948

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Provinsi : [35] KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Satker : [649572] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.649572/2024**



DS:3759-2576-5838-2500

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 08

Tanggal : 18 November 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
4. Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
- Sebesar : Rp. 5.535.385.000 (LIMA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.136.064.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	399.321.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN T A R A K A N (048) Rp. 5.535.385.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024

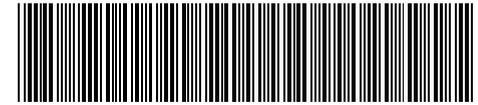


DS:3759-2576-5838-2500

Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	547.500.000
EC.3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp.	407.000.000
EC.7010	Manajemen Mutu	Rp.	140.500.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.987.885.000
WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp.	4.987.885.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 1

Program	: 032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			547.500.000
Kegiatan	: 3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			407.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase UMKM dan skala menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP			
	: 2. 02	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			
	: 3. 03	Persentase Produk Impor yang memenuhi persyaratan mutu			
	: 4. 04	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan			
	: 5. 05	Lokasi pengawasan mutu Hasil KP di wilayah RI			
	: 6. 06	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI			
	: 7. 07	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability			
	: 8. 08	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan			
	: 9. 09	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan			
	: 10. 10	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan			
	: 11. 11	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 3989.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.000.000
Rincian Output	: 01 ABR.009	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 3989.ADF	Sertifikasi Lembaga	5,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	30.000.000
Rincian Output	: 01 ADF.001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	5,00	Lembaga	30.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1,00	Produk, Laporan, Keputusan	10.000.000
Rincian Output		:	01	BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1,00	Produk	10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3989.PDC	Sertifikasi Produk		50,00	produk, Sertifikat	55.000.000
Rincian Output		:	01	PDC.001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (PN)	30,00	produk	30.000.000
Rincian Output		:	02	PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (PN)	20,00	produk	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3989.PDF	Sertifikasi Lembaga		19,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	100.000.000
Rincian Output		:	01	PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (PN)	19,00	Lembaga	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		4,00	Produk, Laporan, Keputusan	87.000.000
Rincian Output		:	01	QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (PN)	4,00	Produk	87.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		25,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	115.000.000
Rincian Output		:	01	QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (PN)	10,00	Lembaga	15.000.000
Rincian Output		:	02	QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PN)	15,00	Lembaga	100.000.000
Kegiatan		:	7010	Manajemen Mutu				140.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	8	:	7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		2,00	Orang, Kegiatan	12.000.000
Rincian Output		:	01	DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	2,00	Kegiatan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	90.000.000
Rincian Output		:	01	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	90.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	7010.PDD	Standarisasi Lembaga		2,00	Lembaga, Unit Kerja	29.500.000
Rincian Output		:	01	PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (PN)	1,00	Unit Kerja	9.000.000
Rincian Output		:	02	PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (PN)	1,00	Unit Kerja	20.500.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1,00	Produk, Laporan, Keputusan	9.000.000
Rincian Output		:	01	QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (PN)	1,00	Produk	9.000.000
Program		:	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				4.987.885.000
Kegiatan		:	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				4.987.885.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Nilai PM PRB BKIPM			
		:	2.	02	Indeks Profesionalitas ASN			
		:	3.	03	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi			
		:	4.	04	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran			
		:	5.	05	Nilai PM SAKIP			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : I A. 4

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- 6. 06 Nilai Maturitas SPIP
- 7. 07 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- 8. 08 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- 9. 09 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik
- 10. 10 Nilai IKPA
- 11. 11 Nilai NKA
- 12. 12 Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.851.657.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	21.500.000
		:	02	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	23.808.000
		:	03	EBA.962 Layanan Umum	2,00	Layanan	10.800.000
		:	04	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	3.650.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	4.791.899.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	35,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	31.250.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	35,00	Orang	31.250.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	104.978.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	29.640.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	39.020.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	33.043.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TARAKAN

Halaman : I A. 5

		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
04	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Dokumen		3.275.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	5.535.385.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	5.136.064.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	399.321.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



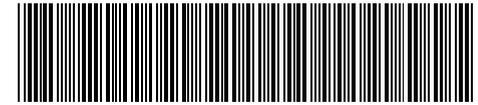
DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	2.753.905	2.781.480	-	-	-	5.535.385		
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	547.500	-	-	-	547.500		
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	-	407.000	-	-	-	407.000		
3989.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	10.000	-	-	-	10.000	35 . 51	
04	PNBP	-	10.000	-	-	-	10.000	048	
3989.ADF	Sertifikasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	30.000	-	-	-	30.000	35 . 51	
01	RM	-	18.045	-	-	-	18.045	048	
04	PNBP	-	11.955	-	-	-	11.955	048	
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	10.000	-	-	-	10.000	35 . 51	
04	PNBP	-	10.000	-	-	-	10.000	048	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3989.PDC	Sertifikasi Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	55.000	-	-	-	55.000	35 . 51	
01	RM	-	8.600	-	-	-	8.600	048	
04	PNBP	-	46.400	-	-	-	46.400	048	
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	100.000	-	-	-	100.000	35 . 51	
01	RM	-	24.480	-	-	-	24.480	048@	
04	PNBP	-	75.520	-	-	-	75.520	048@	
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	87.000	-	-	-	87.000	35 . 51	
01	RM	-	87.000	-	-	-	87.000	048	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	115.000	-	-	-	115.000	35 . 51	
01	RM	-	8.600	-	-	-	8.600	048	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
 Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	106.400	-	-	-	106.400	048	
7010	Manajemen Mutu	-	140.500	-	-	-	140.500		
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	12.000	-	-	-	12.000	35 . 51	
04	PNBP	-	12.000	-	-	-	12.000	048@	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	90.000	-	-	-	90.000	35 . 51	
01	RM	-	46.580	-	-	-	46.580	048	
04	PNBP	-	43.420	-	-	-	43.420	048	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	29.500	-	-	-	29.500	35 . 51	
04	PNBP	-	29.500	-	-	-	29.500	048	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN)	-	9.000	-	-	-	9.000	35 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAkan
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	9.000	-	-	-	9.000	048	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	2.753.905	2.233.980	-	-	-	4.987.885		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.753.905	2.233.980	-	-	-	4.987.885		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	2.753.905	2.097.752	-	-	-	4.851.657	35 . 51	
01	RM	2.753.905	2.073.944	-	-	-	4.827.849	048	
04	PNBP	-	23.808	-	-	-	23.808	048	
3987.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	-	31.250	-	-	-	31.250	35 . 51	
01	RM	-	31.250	-	-	-	31.250	048	
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (35.51 KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAkan)	-	104.978	-	-	-	104.978	35 . 51	
01	RM	-	83.660	-	-	-	83.660	048	
04	PNBP	-	21.318	-	-	-	21.318	048	
JUMLAH		2.753.905	2.781.480	-	-	-	5.535.385		

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (35) KALIMANTAN UTARA
Kode>Nama Satker : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	67.759	455.640	374.839	379.543	412.416	426.401	464.339	513.728	266.750	491.181	805.393	877.397	5.535.385
		BELANJA PEGAWAI	26.071	198.987	180.484	240.265	249.345	262.872	173.702	206.612	170.998	172.179	376.546	495.843	2.753.905
		BELANJA BARANG	41.688	256.653	194.355	139.278	163.071	163.529	290.637	307.116	95.751	319.002	428.847	381.554	2.781.480
032.13.EC.3989		Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	0	16.105	49.248	4.020	18.854	7.381	15.770	27.406	24.255	46.557	113.054	84.349	407.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	16.105	49.248	4.020	18.854	7.381	15.770	27.406	24.255	46.557	113.054	84.349	407.000
032.13.EC.7010		Manajemen Mutu	0	0	0	0	0	0	17.826	30.996	7.920	26.640	28.559	28.559	140.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	17.826	30.996	7.920	26.640	28.559	28.559	140.500
032.13.WA.3987		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	67.759	439.535	325.590	375.523	393.563	419.020	430.743	455.326	234.574	417.984	663.780	764.489	4.987.885
		51 BELANJA PEGAWAI	26.071	198.987	180.484	240.265	249.345	262.872	173.702	206.612	170.998	172.179	376.546	495.843	2.753.905
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	41.688	240.548	145.107	135.258	144.218	156.148	257.040	248.713	63.576	245.805	287.234	268.646	2.233.980
		PERKIRAAN PENERIMAAN	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	57.500	57.500	67.500	730.000
		- PNB (425289)	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	690.000
		- PNB (425332)	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [35] KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Satker : [649572] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

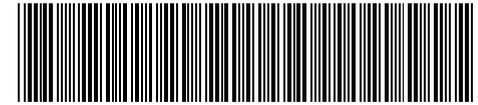
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 22.430		
	52 Belanja Barang Rp. 22.430		
032.13.EC 3989	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.610 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7010	Manajemen Mutu		
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 820 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 032.13.2.649572/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3759-2576-5838-2500

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [35] KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Satker : [649572] BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-032.13.2.649572/2024

Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (35.51) KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN KPPN : (048) Tarakan

Satuan Kerja : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00060/DRPP/649572/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	48.000.000,00	196.631.082,00	244.631.082,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	48.000.000,00	196.631.082,00	244.631.082,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	48.000.000,00	102.605.806,00	150.605.806,00	0,00
	1. BP UP*)	48.000.000,00	50.196.718,00	98.196.718,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	26.020.000,00	26.020.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	20.795.019,00	20.795.019,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	5.594.069,00	5.594.069,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



KOTA TARAKAN, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

NURHAYATI

NIP. 198212202014102001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (35.51) KALIMANTAN UTARA / KOTA TARAKAN
 Satuan Kerja : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 : TARAKAN
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-032.13.2.649572/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (048) Tarakan
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
		(*)
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
		(-)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
		(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
		(-)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	19.555.000,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 19.555.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 19.555.000,00 karena Selisih pembukuan UAKPA sebesar RP 19.555.000,00 karena adanya penyetoran PNBP langsung ke kas negara tanpa melalui bendahara penerimaan

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



M. ROY PAHLAVI

NIP. 197906052003121004

KOTA TARAKAN , 02 Januari 2025

Bendahara Penerimaan

AMALIA OKTAVIA

NIP 198910132015032006

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (13)

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN (649572)

Rekening Induk : RKK BKIPM KHP KKP OP (023001xxxxx303)

Virtual Account : 650956495721000 | BPG 048 SKIPM TARAKAN

Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-02	09:09:39	36089520	From 032901003295305 to 650956495721000 Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP Nomor 00826T Tanggal240481301004923000001	2.672.639,00	0,00	4.334.900,00	7.007.539,00	SPAN	
2024-12-03	12:39:59	36171970	From 032901003295305 to 650956495721000 Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang sesuai dengan SPP Nomor 00849T Tanggal 2 240481301004972000001	7.007.539,00	0,00	45.137.618,00	52.145.157,00	SPAN	
2024-12-04	09:36:52	36218158	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301004961000001	52.145.157,00	0,00	960.000,00	53.105.157,00	SPAN	
2024-12-04	09:36:52	36218159	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301004962000001	53.105.157,00	0,00	640.000,00	53.745.157,00	SPAN	
2024-12-04	13:22:02	36243925	sppr	53.745.157,00	47.400.000,00	0,00	6.345.157,00	TELLER_CARD	
2024-12-04	13:22:33	36243957	sppr	6.345.157,00	1.600.000,00	0,00	4.745.157,00	TELLER_CARD	
2024-12-05	10:42:16	36300789	From 650956495721000 to 459601021908537 VA650956495721000Tagihan Radar Tarakan 8	4.745.157,00	600.000,00	0,00	4.145.157,00	CMS	
2024-12-05	12:09:15	36309516	From 032901003295305 to 650956495721000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) RM Satker Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keam240481301005094000001	4.145.157,00	0,00	26.020.000,00	30.165.157,00	SPAN	
2024-12-05	14:35:54	36324626	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301740106	30.165.157,00	4.334.900,00	0,00	25.830.257,00	ATM	
2024-12-06	09:10:42	36352104	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301005080000001	25.830.257,00	0,00	960.000,00	26.790.257,00	SPAN	
2024-12-11	09:21:24	36532509	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang berupa Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Se240481301005342000001	26.790.257,00	0,00	1.710.000,00	28.500.257,00	SPAN	
			From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perjalanan Dinas sesuai SPD Nomor 087/SPD/649572/XI/2024						

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-12	08:51:40	36573510	Tanggal240481301005323000001	28.500.257,00	0,00	6.665.019,00	35.165.276,00	SPAN	
2024-12-12	08:55:08	36574036	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301005364000001	35.165.276,00	0,00	7.200.000,00	42.365.276,00	SPAN	
2024-12-16	12:04:53	36696542	From 032901003295305 to 650956495721000 Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP Nomor 00906T Tanggal240481301005562000001	42.365.276,00	0,00	724.200,00	43.089.476,00	SPAN	
2024-12-16	13:31:51	36702292	sppr	43.089.476,00	16.535.019,00	0,00	26.554.457,00	TELLER_CARD	
2024-12-17	06:43:02	36725716	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301740106	26.554.457,00	724.200,00	0,00	25.830.257,00	ATM	
2024-12-17	09:26:16	36735655	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301005513000001	25.830.257,00	0,00	640.000,00	26.470.257,00	SPAN	
2024-12-20	08:48:21	36878128	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Biaya Perjalanan Dinas dalam kota sesuai daftar nominatif nomor 240481301005608000001	26.470.257,00	0,00	1.300.000,00	27.770.257,00	SPAN	
2024-12-20	08:51:29	36879172	From 032901003295305 to 650956495721000 Pembayaran Belanja Barang Keperluan Perjalanan Dinas sesuai SPD Nomor:101/SPD/649572/XII/2024 Tanggal240481301005615000001	27.770.257,00	0,00	720.000,00	28.490.257,00	SPAN	
2024-12-24	13:12:59	37046675	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	28.490.257,00	2.500.000,00	0,00	25.990.257,00	ATM	
2024-12-30	13:33:16	37278024	sppr	25.990.257,00	720.000,00	0,00	25.270.257,00	TELLER_CARD	
2024-12-30	13:33:55	37278114	sppr	25.270.257,00	25.270.257,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		99.684.376,00	97.011.737,00			
			Saldo Akhir				0,00		



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702412312061501	Pembuat Billing NURHAYATI S.Mn	NTPN N/A
Tanggal Billing 31-12-2024 07:46:06	Kementerian/ Lembaga 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NTB N/A
Tanggal Kadaluwarsa 07-01-2025 07:46:06	Unit Eselon I 15 - BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Tanggal Bayar N/A
Status Belum dibayar	Satuan Kerja 648572 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Bank/ Pos Bayar N/A
Keterangan Pengembalian UP T.A 2024		Kanal Bayar -

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NPWP 001732086723000

Uraian	Ases	Jumlah Setoran
Kab/ Kota KOTA TARAKAN	815111	14.951.510,00
Periode DESEMBER 2024		

Total Diotor

IDR 14.951.510,00

(Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluwarsa. Jika masa kadaluwarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran untuk jaminan keterlambatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas lunas data perskun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pertanggungjawaban sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Sliprisi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/otolok bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain. Fasilitas pembayaran yang disediakan oleh cabang/agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera di rekening koran Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong sampaikan kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 31/12/2024 09:14:28 NTB : 241231020659
 Tanggal Buku : 31/12/2024 NTPN : 77EA62CPQHIUB9FM
 Kode Cabang Bank : 0183 STAN : 755643

Data Setoran:

Kode Billing : 702412312061430
 Nama Wajib Bayar : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMAN
 Kementerian/Lembaga : 032
 Unit Eselon I : 13
 Satuan Kerja : 649572
 Jumlah Setoran : Rp. 20,561,000.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA PULUH JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH



*This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMAN 0000 20561000.00 31122024
 31122024 77EA62CPQHIUB9FM 241231020659 755643 139



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
31-12-2024 07:58:29

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702412312061430
Pembuat Billing NURHAYATI S.Mn

Tanggal Billing 31-12-2024 07:41:21
Kementerian / Lembaga 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tanggal Kadaluwarsa 07-01-2025 07:41:21
Unit Eselon I 13 - BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Status Belum dibayar
Satuan Kerja 649572 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Keterangan Pengembalian TUP T.A 2024

Detail Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NPWP 001732098723000
Kab/ Kota KOTA TARAKAN
Periode DESEMBER 2024
815511 20.561.000,00

Total Disetor IDR 20.561.000,00

(Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Ketentuan Pembayaran Tagihan**
- Nomor Transaksi Pemerintah Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
 - Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluwarsa. Jika masa kadaluwarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
 - Pembayaran lunas jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - Pembayaran atas lunas dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pertanggungjawaban sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Slipponi.
 - Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
 - Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/tercetak dalam dokumen. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
 - Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-Call di 14090 dan juga dapat melalui <https://hal.kemkenkeu.go.id/>.
 - Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-Call di 14090 dan juga dapat melalui <https://hal.kemkenkeu.go.id/>.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:36 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	505,730,000	710,005,000	(204,275,000)	(28.771)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	505,730,000	710,005,000	(204,275,000)	(28.771)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	505,730,000	710,005,000	(204,275,000)	(28.771)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,600,492,546	4,177,923,689	(1,577,431,143)	(37.756)
Beban Persediaan	185,587,203	341,021,332	(155,434,129)	(45.579)
Beban Barang dan Jasa	1,556,574,712	1,755,346,371	(198,771,659)	(11.324)
Beban Pemeliharaan	481,741,915	508,685,111	(26,943,196)	(5.297)
Beban Perjalanan Dinas	560,066,446	859,549,642	(299,483,196)	(34.842)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:36 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	531,599,604	788,504,464	(256,904,860)	(32.581)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	1,119	(1,119)	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,916,062,426	8,431,031,728	(2,514,969,302)	(29.83)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,410,332,426)	(7,721,026,728)	2,310,694,302	(29.927)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(34,359,800)	7,000,000	(41,359,800)	(590.854)
Pendapatan Pelepasan Aset	644,000	7,000,000	(6,356,000)	(90.8)
Beban Pelepasan Aset	35,003,800	0	35,003,800	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,160,000	(2,160,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,160,000	(2,160,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(34,359,800)	9,160,000	(43,519,800)	(475.107)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,444,692,226)	(7,711,866,728)	2,267,174,502	(29.399)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,444,692,226)	(7,711,866,728)	2,267,174,502	(29.399)

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

NIP. 197807042008011014

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:37 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,045,542,383	12,685,161,446	(639,619,063)	(5.04)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,444,692,226)	(7,711,866,728)	2,267,174,502	(29.4)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,119	1,446	(327)	(22.61)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	1,119	1,446	(327)	(22.61)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(743,328,428)	7,072,246,219	(7,815,574,647)	(110.51)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,188,019,535)	(639,619,063)	(5,548,400,472)	867.45
EKUITAS AKHIR	5,857,522,848	12,045,542,383	(6,188,019,535)	(51.37)

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

NIP. 197807042008011014

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN 649572

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 6:38 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,535,385,000	5,275,243,954	(260,141,046)	95.30	7,939,123,000	7,769,997,338	(169,125,662)	97.87
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

NIP. 197807042008011014

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	10,116,667	(10,116,667)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	0	223,809	(223,809)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,119)	1,119	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	222,690	(222,690)	(100.00)
Persediaan	364,588,206	454,033,257	(89,445,051)	(19.70)
JUMLAH ASET LANCAR	364,588,206	464,372,614	(99,784,408)	(21.49)
ASET TETAP				
Tanah	676,953,000	1,596,201,100	(919,248,100)	(57.59)
Peralatan dan Mesin	4,920,490,075	7,827,254,880	(2,906,764,805)	(37.14)
Gedung dan Bangunan	5,282,262,981	9,725,744,981	(4,443,482,000)	(45.69)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	323,460,000	1,114,727,520	(791,267,520)	(70.98)
Aset Tetap Lainnya	0	106,480,000	(106,480,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,694,700,581)	(8,763,589,529)	3,068,888,948	(35.02)
JUMLAH ASET TETAP	5,508,465,475	11,606,818,952	(6,098,353,477)	(52.54)
JUMLAH ASET	5,873,053,681	12,071,191,566	(6,198,137,885)	(51.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,530,833	25,649,183	(10,118,350)	(39.45)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,530,833	25,649,183	(10,118,350)	(39.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,530,833	25,649,183	(10,118,350)	(39.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,857,522,848	12,045,542,383	(6,188,019,535)	(51.37)
JUMLAH EKUITAS	5,857,522,848	12,045,542,383	(6,188,019,535)	(51.37)
JUMLAH EKUITAS	5,857,522,848	12,045,542,383	(6,188,019,535)	(51.37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,873,053,681	12,071,191,566	(6,198,137,885)	(51.35)

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

NIP. 197807042008011014

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	64,500,415	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	464,800	0
0.0	117114	Suku Cadang	17,320,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	282,302,991	0
0.0	131111	Tanah	676,953,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,920,490,075	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,282,262,981	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	160,000,000	0
0.0	134113	Jaringan	163,460,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,637,437,441
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	896,415,870
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	128,000,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	32,847,270
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,530,833
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,275,243,954
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	506,597,809	0
0.0	313211	Transfer Keluar	5,532,262,573	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	20,288,000
0.0	391111	Ekuitas	0	12,045,542,383
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,119
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	644,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	504,750,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	980,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	902,157,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,386	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72,631,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,339,526	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15,480,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,550,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,234,154	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	54,677,100	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	127,265,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	753	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,844,320	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,537,728	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,476,160	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,734,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	47,241,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,627,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,191,544,231	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	55,697,638	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	486,093,697	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	89,280,200	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,792,997	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	76,322,886	0
3.0	521211	Beban Bahan	112,221,960	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,948,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	172,787,806	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,381,992	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,641,235	0
3.0	522141	Beban Sewa	36,368,167	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	471,555,772	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,744,740	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201,584,975	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	425,028,534	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	95,370,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,667,912	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	327,844,211	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	158,614,289	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	38,881,597	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	786,337	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,473,170	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	126,272,927	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,962,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	11,450,200	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	59,314,276	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	35,003,800	0
JUMLAH			23,557,680,870	23,557,680,870

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

NIP. 197807042008011014

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,275,243,954
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	506,597,809	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	644,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	504,750,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	980,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	223,809
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	902,157,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,720	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72,631,450	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,339,526	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,550,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,234,154	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	54,677,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	127,265,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	35,000,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	753	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,844,320	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,537,728	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,160	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	6,734,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	47,241,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,627,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,191,544,231	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	55,697,638	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	489,716,978	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	89,280,200	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,792,997	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	76,322,886	0
3.0	521211	Belanja Bahan	112,221,960	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,948,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,778,852	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	175,419,537	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,137,242	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	9,749,323	0
3.0	522141	Belanja Sewa	26,251,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (649572) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 6:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	471,555,772	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,744,740	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201,584,975	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	430,921,662	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95,370,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,667,912	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	334
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	5,893,128
JUMLAH			5,788,815,225	5,788,815,225

Keterangan :

FINAL

KOTA TARAKAN, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ditandatangani
Secara Elektronik

DARMANSYAH

197807042008011014

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (032) KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Eselon I : (13) BKIPM
 Wilayah : (3500) KALIMANTAN UTARA
 Satuan Kerja : (649572) BALAI KIPM TARAkan
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Tagihan Listrik Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

- | | |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | 14 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| 2 <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | 15 <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| 3 <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | 16 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 17 <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| 5 <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | 18 <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| 6 <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | 19 <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| 7 <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | 20 <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| 8 <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | 21 <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU |
| 9 <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 22 <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja |
| 10 <input type="checkbox"/> Persediaan | 23 <input type="checkbox"/> Perolehan Aset |
| 11 <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban | 24 <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang |
| 12 <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 25 <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |
| 13 <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 26 <input type="checkbox"/> |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	14,141,592	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar		14,141,592

Keterangan :

Jurnal Penyesuaian Atas Beban Tagihan Listrik Bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar

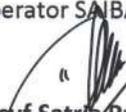
Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/ Akuntansi


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui oleh :
M. Roy Pahlavi, A.Md., S.PKP
 NIP. 19790605 200312 1 004
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (032) KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Eselon I : (13) BKIPM
 Wilayah : (3500) KALIMANTAN UTARA
 Satuan Kerja : (649572) BALAI KIPM TARAkan
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Layanan Perkantoran (Internet)

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

- | | |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | 14 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| 2 <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | 15 <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| 3 <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | 16 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 17 <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| 5 <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | 18 <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| 6 <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | 19 <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| 7 <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | 20 <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| 8 <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | 21 <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU |
| 9 <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 22 <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja |
| 10 <input type="checkbox"/> Persediaan | 23 <input type="checkbox"/> Perolehan Aset |
| 11 <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban | 24 <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang |
| 12 <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 25 <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |
| 13 <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 26 <input type="checkbox"/> |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	521111	Beban Langganan Internet	1,032,300	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar		1,032,300

Keterangan :

Jurnal Penyesuaian Atas Beban Tagihan Internet Bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/ Akuntansi

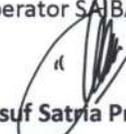

Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024

Disetujui oleh :

M. Roy Pahlevi, A.Md., S.PKP
 NIP. 19790605 200312 1 004
 Tanggal : 31 Desember 2024



Direkam oleh :
Operator SABA


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (032) KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Eselon I : (13) BKIPM
 Wilayah : (3500) KALIMANTAN UTARA
 Satuan Kerja : (649572) BALAI KIPM TARAKAN
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Tagihan Telepon Bulan Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

- | | |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | 14 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| 2 <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | 15 <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| 3 <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | 16 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 17 <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| 5 <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | 18 <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| 6 <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | 19 <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| 7 <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | 20 <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| 8 <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | 21 <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU |
| 9 <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 22 <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja |
| 10 <input type="checkbox"/> Persediaan | 23 <input type="checkbox"/> Perolehan Aset |
| 11 <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban | 24 <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang |
| 12 <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 25 <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |
| 13 <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 26 <input type="checkbox"/> |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	53,391	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar		53,391

Keterangan :

Jurnal Penyesuaian Atas Beban Tagihan Telepon bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/ Akuntansi

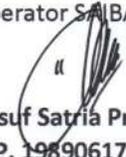

Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui oleh :
KPA

M. Roy Pahavi, A.Md., S.PKP
 NIP. 19790605 200312 1 004
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
Operator SAIBA


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (032) KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Eselon I : (13) BKIPM
 Wilayah : (3500) KALIMANTAN UTARA
 Satuan Kerja : (649572) BALAI KIPM TARAOKAN
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Tagihan PDAM Bulan Desember 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

- | | |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | 14 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| 2 <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | 15 <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| 3 <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | 16 <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 17 <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| 5 <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | 18 <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| 6 <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | 19 <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| 7 <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | 20 <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| 8 <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | 21 <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU |
| 9 <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 22 <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja |
| 10 <input type="checkbox"/> Persediaan | 23 <input type="checkbox"/> Perolehan Aset |
| 11 <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban | 24 <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang |
| 12 <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 25 <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |
| 13 <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | 26 <input type="checkbox"/> |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	303.550	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar		303.550

Keterangan :
 Jurnal Penyesuaian Atas Beban Tagihan langganan Air bulan desember 2024 yang masih harus dibayar

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/ Akuntansi


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui oleh :
 KPA

W. Roy Pahlay, A.Md., S.PKP
 NIP. 19790605 200312 1 004
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
 Operator SAIBA


Yusuf Satria Pratama, S.Pi
 NIP. 19890617 201902 1 006
 Tanggal : 31 Desember 2024

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN II TAHUNAN TA 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (649572) TARAKAN

Kode dan Nama UAPPAW : (053) Kalimantan Utara

Kode dan Nama Eselon 1 : (13) Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kode dan Nama K/L : (032) Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	ada		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	ada		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	ada		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	ada		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	ada		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	ada		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	ada		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	sama		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	sama		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	Sama		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	Sama		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		Tidak	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	Ya		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		Tidak	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		Tidak	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		Tidak	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		Tidak	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		Tidak	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		Tidak	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		Tidak	Tidak
	a. Pagu/DIPA		Tidak	Tidak
	b. Estimasi PNBP		Tidak	Tidak
	c. Belanja		Tidak	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		Tidak	Tidak
	e. Pendapatan		Tidak	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		Tidak	Tidak
	g. Kas BLU		Tidak	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		Tidak	Tidak
	i. Kas Hibah		Tidak	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		Tidak	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		Tidak	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		Tidak	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		Tidak	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		Tidak	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	Ada		Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		Tidak	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		Tidak	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		Tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		Tidak	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	Ya		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	Ya		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	Ya		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	ada		Ada/Tidak

2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		Tidak	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		Tidak	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		Tidak	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		Tidak	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		Tidak	Tidak
9	Terdapat akun 421xx/422xx/423xx dan 425xx KHUSUS BUN		Tidak	Tidak
10	Terdapat akun 425xx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		Tidak	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		Tidak	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		Tidak	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		Tidak	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		Tidak	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		Tidak	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		Tidak	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		Tidak	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		Tidak	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		Tidak	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		Tidak	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		Tidak	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		Tidak	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		Tidak	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	Ya		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	Ya		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	Ya		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		Tidak	Ada/Tidak

1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		Tidak	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		Tidak	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		Tidak	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		Tidak	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Tidak	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		Tidak	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		Tidak	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	Ya		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	Ya		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	Ya		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	Ya		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	Ya		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		Tidak	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	Ya		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		Tidak	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		Tidak	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		Tidak	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		Tidak	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	Ya		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		Tidak	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	ya		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		Tidak	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		Tidak	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	ya		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRAB/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		Tidak	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		tidak	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		tidak	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		tidak	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		tidak	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	ya		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		Tidak	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		Tidak	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	Ya		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	Ya		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	Ya		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	Ya		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	Ya		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
		Ya	Tidak	Seharusnya

1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		Tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	Ya		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		Tidak	Ya/Tidak

TELAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya

	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk



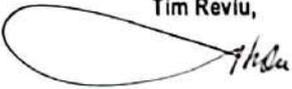
Mengetahui
 Pejabat Penyusun LKBL
 (M. Roy Pahlayi, A.Md., S.PKP)
 NIP. 19790605 200312 1 004

Tarakan, 14 Januari 2025
 Penelaah,

(Signature)

Yusuf Satria Pratama, S.Pi.
 NIP .19890617 201902 1 006

Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Ahdlar / 16 Januari 2025
		Direviu oleh/Tanggal	Agus / 16 Januari 2025
		Disetujui oleh/Tanggal	Irman / 16 Januari 2025
UAPA	<input type="checkbox"/>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
UAPPA-E1	<input type="checkbox"/>	BPPMKHP	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	Provinsi Kalimantan Utara	
UAKPA	<input type="checkbox"/>	Balai PPMHKP Tarakan (649572)	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :			
<ol style="list-style-type: none"> Satker belum melakukan tutup buku per bulan Desember 2024 dan belum terbit SHR; Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00 sesuai dengan BA Kas Opname dan LPJ Bendahara Penerimaan; Persediaan senilai Rp364.588.206,00 telah didukung dengan BA Stock Opname dan sesuai dengan Permen KP 37 Tahun 2023; Telaah LK oleh Biro Keuangan belum dilakukan; Validitas data laporan keuangan pada MonSAKTI per tanggal 16 Januari 2025 diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan pada Menu To Do List Aset Lain-Lain (rusak berat) senilai Rp 260.316.300 sebanyak 21 Unit telah dilakukan penghapusan yaitu Lemari Besi Metal (2 Unit), Mesin Absensi (1 Unit), Meja Rapat (1 Unit), A.C Split (1 Unit), Exhaust Fan (1 Unit), UPS (2 Unit), Kursi DOrong (@Unit) Kursi Zels (2 Unit), Incubator (1 Unit), Pipa U (1 Unit), Stereo Microscope (1 Unit), Digital Multi Tester (2 Unit), Printer (2 Unit), Router (1 Unit), Blower (1 Unit). 			
Tidak Terdapat Koreksi			
Penyajian LK :			
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :			
Pagu sebesar Rp5.535.385.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.282.217.416,00 (95,43%) Target Pendapatan sebesar Rp730.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp506.597.809,00 (69,4%)			
Tidak ada koreksi			
B. Laporan Operasional :			
Surplus/Defisit LO senilai Rp(5.274.404.256)			
Tidak ada koreksi			
C. Laporan Perubahan Ekuitas :			
Ekuitas awal senilai Rp12.045.542.383,00 Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(6.017.731.565) Ekuitas akhir senilai Rp6.027.810.818,00			
Tidak ada koreksi			
D. Neraca :			
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Aset senilai Rp6.043.341.651,00, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Aset Lancar senilai Rp364.588.206,00 Aset Tetap senilai Rp5.678.753.445,00 Aset Lainnya senilai Rp0,00 Jumlah Kewajiban senilai Rp15.530.833,00, berupa Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja Barang yang masih harus dibayar untuk: 1) Listrik Kantor Utama Bulan Desember senilai Rp14.141.592,00; 2) 			

3. Ekuitas senilai Rp6.027.810.818,00		
4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp6.043.341.651,00		
Tidak ada koreksi		
E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN		
CaLK sampai saat direviu masih dalam proses penyusunan, terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK, antara lain Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional yang diungkapkan pada Catatan Lainnya sesuai format Lampiran III.C Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-3/PB/2025 Tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampalan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited)		
Usulan Koreksi		
Melengkapi CaLK dengan Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sesuai format Lampiran III.C Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-3/PB/2025 Tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampalan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited)		
Tindak Lanjut		
Satker telah melaksanakan tindak lanjut berupa:		
1. Melengkapi CaLK dengan Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sesuai format Lampiran III.C Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-3/PB/2025 Tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampalan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited)		
Koreksi yang Belum Ditindak Lanjut		
-		
		Bandung, 16 Januari 2025
<p>Tim Reviu,</p>  <p>Ahdjar Aprianto</p>	<p>Operator Keuangan,</p>  <p>Yusuf Satria Pratama</p>	<p>Operator BMN</p>  <p>Fajar Syahputra</p>

LAPORAN PRIORITAS NASIONAL SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/ Lembaga : (032) Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Unit Organisasi : (13) Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Satuan Kerja : (649572) Balai KIPM Tarakan

Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Lokasi : Tarakan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3989.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.000.000	9.997.298	99,97	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	Non PN
3989.ADF.001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	30.000.000	29.083.000	96,94	5	5	Lembaga	100	Non PN
3989.BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	10.000.000	10.000.000	100	1	1	Produk	100	PN
3989.PDC.001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	30.000.000	29.965.188	99,88	30	34	Produk	100	PN
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	25.000.000	15.978.771	63,92	20	55	Produk	100	PN
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	100.000.000	75.168.859	75,16	19	33	Lembaga	100	PN

3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	87.000.000	85.559.642	98,34	4	4	Produk	100	PN
3989.QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	15.000.000	14.979.369	99,86	6	8	Lembaga	100	PN
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100.000.000	91.717.760	91,72	15	26	Lembaga	100	PN
7010.DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	12.000.000	11.177.304	93,14	2	2	Kegiatan	100	Non PN
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	90.000.000	81.266.112	90,30	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	Non PN
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	9.000.000	8.927.560	99,2	1	1	Unit Kerja	100	Non PN
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	20.500.000	17.820.800	86,93	1	1	Unit Kerja	100	Non PN
7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	9.000.000	8.558.578	95,10	1	1	Produk	100	Non PN

3987.EBA.956	Layanan BMN	21.500.000	21.479.900	99,91	1	1	Layanan	100	Non PN
3987.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	23.808.000	15.763.019	66,21	1	1	Layanan	100	Non PN
3987.EBA.962	Layanan Umum	10.800.000	10.797.500	99,98	2	2	Layanan	100	Non PN
3987.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.650.000	3.551.500	97,30	1	1	Layanan	100	Non PN
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.791.899.000	4,598,668,896	95,97	1	1	Layanan	100	Non PN
3987.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	31.250.000	31,214,054	99,88	35	35	Orang	100	Non PN
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	29.640.000	29,558,870	99,73	1	1	Dokumen	100	Non PN
3987.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.020.000	38,840,948	99,54	1	1	Dokumen	100	Non PN
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	33.043.000	32,974,360	99,79	1	1	Dokumen	100	Non PN
3987.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3.275.000	3,275,000	100	1	1	Dokumen	100	Non PN

Tarakan, 14 Januari 2025

KPA Balai KIPM Tarakan



M. Roy Fahlavi, A.Md, S.PKP.

LAPORAN PRIORITAS NASIONAL SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/ Lembaga : (032) Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Unit Organisasi : (13) Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Satuan Kerja : (649572) Balai KIPM Tarakan

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya	87.000.000	85.559.642	98,34	Produk	4	4	100
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	78.390.000	75.168.859	95,89	Lembaga	19	33	100
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	30.000.000	29.965.188	99,88	Produk	30	34	100
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	25.000.000	15.978.771	63,92	Produk	20	55	100
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	15.000.000	14.979.369	99,86	Lembaga	6	8	100

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100.000.000	91.717.760	91,72	Lembaga	15	26	100
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	90.000.000	81.266.112	90,30	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	9.000.000	8.927.560	99,20	Unit Kerja	1	1	100
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	20.500.000	17.820.800	86,93	Unit Kerja	1	1	100
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	9.000.000	8.558.578	95,10	Produk	1	1	100

Tarakan, 14 Januari 2025

RPA Balai KIPM Tarakan



M. Roy Pahlavi, A.Md, S.PKP.